

KEMENTERIAN KEUANGAN
KANWIL DJKN DKI JAKARTA
KPKNL JAKARTA IV

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN AUDITED
KPKNL JAKARTA IV
TINGKAT UAKPA
TAHUN ANGGARAN 2023



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun Laporan Keuangan Tahunan (audited) Tahun Anggaran 2023 berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan Tahunan Audited Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawabandan transparansi pengelolaan Keuangan Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 8 Mei 2024



Ditandatangani secara elektronik
Rofiq Manshur



Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	v
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV	8
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	9
A.3. Basis Akuntansi	9
A.4. Dasar Pengukuran	9
A.5. Kebijakan Akuntansi	10
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	19
B.1. Pendapatan	20
B.2. Belanja	21
B.3. Belanja Pegawai	22
B.4. Belanja Barang	22
B.5. Belanja Modal	23
B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24
B.6. Belanja COVID-19	25
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	26
C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran	26
C.2. Kas di Bendahara Penerimaan	26
C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas	27
C.4. Piutang Bukan Pajak	28
C.5. Persediaan	28
C.6. Peralatan dan Mesin	29
C.7. Aset Tetap Lainnya	31
C.8. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	31
C.9. Aset Lain-Lain	32
C.10. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	32
C.11. Uang Muka dari KPPN	33
C.12. Utang kepada Pihak Ketiga	33
C.13. Utang Jangka Pendek Lainnya	34



C.14 Ekuitas	34
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	35
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	35
D.2 Beban Pegawai	35
D.3 Beban Persediaan	36
D.4 Beban Barang dan Jasa	36
D.5 Beban Pemeliharaan	37
D.6 Beban Perjalanan Dinas	38
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	39
D.8 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	41
D.9 Kegiatan Non Operasional	41
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	42
E.1 Ekuitas Awal	42
E.2 Surplus (Defisi) LO	42
E.3 Penyesuaian Nilai Aset	42
E.4 Koreksi Nilai Persediaan	42
E.5 Selisih Revaluasi Aset Tetap	42
E.6 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	43
E.7 Koreksi Lain-Lain	43
E.8 Transaksi Antar Entitas	43
E.9 Ekuitas Akhir	45
F. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya	45



Lampiran-lampiran Pendukung

Neraca Percobaan

LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja

LRA Pendapatan dan Pengembalian Pendapatan

BAR Rekonsiliasi dengan KPPN Jakarta II

BA Opname Fisik Barang Persediaan dan Laporan Mutasi Barang Persediaan

BAR Rekon Piutang Negara

BAR Rekon Bea Lelang Pegadaian

BAR Rekon Bea Pelelang PL Kelas I

Lampiran Pendukung Lainnya



KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV

*Jl. PRAJURIT KKO USMAN DAN HARUN NOMOR 10 JAKARTA PUSAT
TELEPON 021 3448363,3440910, FAXIMILE 021 3448363*





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DKI
JAKARTA**

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV
JALAN PRAJURIT KKO USMAN DAN HARUN NOMOR 10, SENEN, JAKARTA PUSAT 10410; TELEPON : (021) 3448363;
3440910 FAKSMILE (021) 3448363, SUREL :KPKNLJAKARTA4@KEMENKEU.GO.ID, LAMAN:
HTTP://WWW.DJKN.KEMENKEU.GO.ID/KPKNL-JAKARTA4

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahunan audited Tahun Anggaran 2023 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Audited Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 8 Mei 2024

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik

Rofiq Manshur



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahunan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan, Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV Tahun Anggaran 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp89,118,363,923,- atau mencapai 506 persen dari estimasi pendapatan-LRA sebesar Rp17,600,856,000,-.

Realisasi Belanja Negara pada Tahunan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1,822,192,875,- atau mencapai 85 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp2,135,186,000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp927,590,190,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp397,650,943,- Aset Tetap (neto) sebesar Rp529,939,247,- dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp247,490,200,- dan Rp680,099,990,-.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat disajikan sebagai berikut:



Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	Persentase
Aset				
Aset Lancar	397,650,943	20,757,533,094	(20,359,882,151)	(98.08)
Aset Tetap	529,939,247	590,162,087	(60,222,840)	(10.20)
Aset Lainnya	0			-
Jumlah Aset	927,590,190	21,347,695,181	(20,420,104,991)	(95.65)
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek				
- Utang kepada Pihak Ketiga	247,490,200	20,678,274,488	(20,430,784,288)	(98.80)
- Uang Muka KPPN	0	0	0	
- Utang Yang Belum Ditagihkan	0	0	0	
Jumlah Kewajiban	247,490,200	20,678,274,488	(20,430,784,288)	(98.80)
Ekuitas				
Ekuitas	680,099,990	669,420,693	10,679,297	1.60
Jumlah Ekuitas	680,099,990	669,420,693	10,679,297	1.60
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	927,590,190	21,347,695,181	(20,420,104,991)	(95.65)

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp89,136,818,468,- sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp1,900,475,623,- sehingga terdapat surplus dari Kegiatan Operasional sebesar



Rp87,236,342,845,-. Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp0,- dan Rp0,- sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp87,236,342,845,-

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 sebesar Rp669,420,693,- ditambah Surplus-LO sebesar Rp87,236,342,845,- kemudian dikurangi dengan Koreksi Lain-lain senilai Rp0 dan koreksi-koreksi senilai Rp0,- dikurangi Transaksi Antar Entitas sebesar Rp(87,225,663,548),- sehingga ekuitas mengalami kenaikan sebesar Rp10,679,297,-. Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp680,099,990,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 DAN
31 Desember 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA. 2023		% thd. Angg	TA. 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	17,600,856,000	89,118,363,923	506	52,882,923,451
JUMLAH PENDAPATAN		17,600,856,000	89,118,363,923	506	52,882,923,451
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	0	0	0	570,135,059
Belanja Barang	B.4	2,046,321,000	1,737,292,875	85	1,453,644,424
Belanja Modal	B.5	88,865,000	84,900,000	96	0
JUMLAH BELANJA		2,135,186,000	1,822,192,875	85	1,453,644,424



II. NERACA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV

NERACA

PER 31 Desember 2023 DAN 31 Desember 2022

(dalam Rp)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET			
Aset Lancar	C		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	18,454,545	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	245,654,658	20,677,480,005
Piutang Bukan Pajak	C.4	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.4	0	0
Persediaan	C.5	133,541,740	80,053,089
Jumlah Aset Lancar		397,650,943	20,757,533,094
Aset Tetap			
Peralatan dan Mesin	C.6	4,470,500,878	4,305,300,878
Aset Tetap Lainnya	C.7	8,743,450	8.743.450
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.8	(3,949,305,081)	(3,723,882,241)
Jumlah Aset Tetap		529,939,247	590,162,087
Aset Lainnya			
Aset Lain-Lain	C.9	0	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.10	0	0
Jumlah Aset Lainnya		0	0
JUMLAH ASET		927,590,190	21,347,695,181
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Uang Muka dari KPPN	C11	0	0
Utang kepada Pihak Ketiga	C12	247,490,200	20,678,274,488
Utang Yang Belum Ditagihkan	C13	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		247,490,200	20,678,274,488
JUMLAH KEWAJIBAN		247,490,200	20,678,274,488
EKUITAS			
Ekuitas	C.14	680,099,990	669,420,693
Jumlah Ekuitas		680,099,990	669,420,693
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		927,590,190	21,347,695,181



III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 DAN 31 Desember 2022

(dalam Rp)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	89,136,818,468	52,882,923,451
JUMLAH PENDAPATAN		89,136,818,468	52,882,923,451
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	0	0
Beban Persediaan	D.3	155,273,814	193,997,999
Beban Barang dan Jasa	D.4	938,177,942	870,918,270
Beban Pemeliharaan	D.5	198,529,817	164,720,190
Beban Perjalanan Dinas	D.6	392,863,710	202,362,658
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	215,630,340	191,868,147
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	D.8	0	0
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		1,900,475,623	1,623,867,264
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		87,236,342,845	51,259,056,187
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9	0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
SURPLUS (DEFISIT) DARI PELEPASAN ASET NON LANCAR		0	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0	0
SURPLUS (DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL		87,236,342,845	51,259,056,187



IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 DAN 31 Desember 2022

(dalam Rp)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	669,420,693	725,885,408
SURPLUS (DEFISIT) - LO	E.2	87,236,342,845	51,259,056,187
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR		0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E.3	0	0
Koreksi Nilai Pesediaan	E.4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.6	0	0
Koreksi Lain-Lain	E.7	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.8	(87,225,663,548)	(51,315,520,902)
KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS		10,679,297	(56,464,715)
EKUITAS AKHIR	E.9	680,099,990	669,420,693

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan PMK 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal. berkedudukan di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 10 Jakarta Pusat.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV berkomitmen dengan visi *“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui pembinaan akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas*

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplentasikan.
- Mengembangkan sistem pembinaan yang profesional dan terpercaya.
- Menyenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.



A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI yang dipakai pada saat ini adalah Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas, informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3 Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4 Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang



Jakarta IV dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5 Kebijakan Akuntansi

*Kebijakan
Akuntansi*

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-atruan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV. Disamping itu, dalam penyusunannya telah ditetapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan – LRA

Pendapatan –LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.



2. Pendapatan – LO

Pendapatan –LO

- Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasikan, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia sesuai SE-17/MK.1/015 adalah sebagai berikut :
 - Penerimaan Bea Lelang Penjual dan Pembeli atas lelang non eksekusi oleh Pejabat Lelang Kelas II;
 - Penerimaan atas Kertas Sekuriti untuk Pembuatan Kutipan Risalah Lelang bagi Pejabat Lelang Kelas II;
 - Penerimaan Bea Lelang Penjual dan Pembeli atas Lelang Pegadaian;
 - Penerimaan atas Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II;
 - Penerimaan Pemberian Izin Operasional Balai Lelang;
 - Penerimaan atas Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Lelang Kelas II;
 - Penerimaan denda Keterlambatan Penyetoran Bea Lelang Ke Kas Negara oleh Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II;
 - Penerimaan Bea Lelang Batal atas Permintaan Penjual;
 - Penerimaan Bea Lelang Penjual dan Pembeli atas lelang Eksekusi, Non Eksekusi oleh Pejabat Lelang Kelas I dan Lelang Kayu hasil Hutan lainnya dari tangan pertama;
 - Penerimaan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dari Penanggung Hutang;
 - Penerimaan Uang Jaminan Penawaran Lelang dari Pembeli Wanprestasi;
 - Penerimaan atas Uang Jaminan Penawaran Lelang Yang Tidak Diambil;
 - Penerimaan Kelabihan Hasil Bersih Lelang PUPN yang Tidak Diambil oleh Penanggung Hutang dan/ atau Penjamin Hutang;
 - Penerimaan Pemohon Lelang Tidak Bersedia Mengambil/



mencairkan Cek/BG Menerima Hasil Bersih Lelang;

➤ Penyetoran atas Penerimaan Piutang Yang Tidak Jelas.

(*Kementerian Negara/Lembaga agar menyesuaikan pengakuan Pendapatan-LO sesuai karakteristik pendapatan masing-masing entitas).

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3. Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Beban

Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset
Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%



Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,- (dua puluh

Aset Tetap



lima juta rupiah);

- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan Antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pekerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman

*Penyusutan Aset
Tetap*



Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum table masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap

KELOMPOK ASET TETAP	MASA MAFAAT
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 Tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan

Piutang Jangka Panjang

Aset Lainnya



berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

KELOMPOK ASET TAK BERWUJUD	MASA MAFAAT
Software Komputer	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintahan yang disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

6. Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Kewajiban



dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

7. Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih Antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

URAIAN	TA. 2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
PENDAPATAN		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	17,600,856,000	17,600,856,000
JUMLAH PENDAPATAN	17,600,856,000	17,600,856,000
BELANJA		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	1.764.060.000	2,046,321,000
Belanja Modal	88,865,000	88,865,000
JUMLAH BELANJA	1,852,925,000	2,135,186,000

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan
Rp 89,118,363,923,-

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp89,118,363,923,- atau mencapai 506 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp17,600,856,000,-. Pendapatan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV terdiri dari: Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I; Pendapatan Bea Lelang Pegadaian; Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

URAIAN	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg
PENDAPATAN JASA			
<i>Pendapatan Jasa Lainnya</i>	0	49,527,453	0
<i>Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I</i>	13,651,000,000	67,818,660,365	496
<i>Pendapatan Bea Lelang Pegadaian</i>	2,856,000,000	4,093,327,592	143
<i>Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara</i>	1,068,856,000	17,156,848,513	1605
JUMLAH PENDAPATAN JASA	20,808,195,000	89,118,363,923	506
PENDAPATAN LAIN-LAIN			
<i>Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin</i>	16,000,000	0	0
<i>Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan</i>	9,000,000	0	0
<i>Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL</i>	0	0	0
<i>Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL</i>	0	0	0
JUMLAH PENDAPATAN LAIN-LAIN	0	0	0
JUMLAH PENDAPATAN	17,600,856,000	73,832,503,387	419.48



Realisasi Pendapatan Jasa Tahunan TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 246 persen dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan oleh kenaikan Pendapatan bea lelang pejabat lelang kelas I kenaikan pendapatan dan pendapatan biaya administrasi pengurusan piutang negara secara signifikan. Salah satu penyumbang kenaikan pendapatan bea lelang pejabat lelang kelas I karena adanya Lelang PPA Kejaksaan Agung sebesar Rp 38.900.000.000,- sedangkan pendapatan biaya administrasi pengurusan piutang negara dari pengurusan piutang negara PT Kedap Sayaq Direktorat Jenderal Planologi sebesar Rp 1.239.509.509,-

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Rp
1,822,192,875,-

Realisasi belanja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV Tahunan TA 2023 adalah sebesar Rp 1,822,192,875,- atau sebesar 85 persen dari pagu belanja senilai Rp 2,135,186,000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahunan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2023*

URAIAN	2023		
	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI ANGGARAN
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	2,046,321,000	1,637,455,277	85
Belanja Modal	88,865,000	84,900,000	96
Total Belanja Kotor	2,135,186,000	1,722,355,277	85
Pengembalian Belanja	0	0	0
JUMLAH	2,135,186,000	1,722,355,277	85

Dibandingkan dengan TA 2022, realisasi belanja TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 25 persen. Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut:



- Adanya penambahan pagu untuk keperluan BLBI sebesar Rp 282.000.000,- di triwulan II yang menyebabkan perencanaan penyerapan anggaran meleset.
- Adanya keterlambatan pada supplier untuk penyampaian Invoice belanja modal berupa meja di akhir Tahunan yang menyebabkan diakuinya belanja modal pada TahunanI.

Perbandingan realisasi Belanja TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	1,737,292,875	1,453,644,424	20
Belanja Modal	84,900,000	0	100
Jumlah Belanja	1,822,192,875	1,453,644,424	25

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Rp0,-

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi Belanja Pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2023 dan TA.2022

Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	Naik (Turun)%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	0	0
Belanja Lembur	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian	0	0	0
Jumlah Belanja Bersih	0	0	0

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp1,737,292,875,-

Belanja Barang adalah Pengeluaran untuk pembelian barang



dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.

Realisasi Belanja Barang TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1,737,292,875,- dan Rp1,453,644,424,-. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami penurunan sebesar 21,45 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2022. Hal ini disebabkan adanya penambahan pagu untuk keperluan BLBI sebesar Rp 282.000.000,- di triwulan II yang menyebabkan perencanaan penyerapan anggaran meleset.

Perbandingan Belanja Barang
TA 2023 dan TA 2022

Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	Naik (Turun)%
Belanja Barang Operasional	854,443,551	390,012,289	
Belanja Barang Non Operasional	7,518,500	21,571,100	
Belanja Jasa	9,142,452	14,359,985	
Belanja Pemeliharaan	198,529,817	109,898,200	
Belanja Persediaan	80,750,770	178,925,568	
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	19,140,149	89,125,628	
Jumlah Belanja Kotor	1,737,292,875	803,892,770	(21,45)
Pengembalian	0	0	
Jumlah Belanja Bersih	1,737,292,875	803,892,770	(21,45)

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal Rp
84,900,000,-

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 84,900,000,- dan Rp0,-.



Realisasi Belanja Modal pada TA 2023 adalah sebagai berikut.

*Perbandingan Belanja Modal
TA 2023 dan TA 2022*

<i>Uraian</i>	<i>Realisasi TA 2023</i>	<i>Realisasi TA 2022</i>	<i>Naik (Turun) %</i>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84,900,000	0	100
Belanja Modal Lainnya	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	84,900,000	0	100
Pengembalian	0	0	0
Jumlah Belanja Bersih	84,900,000	0	100

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 adalah sebesar Rp84,900,000,- yang belum keseluruhan belanja modal terealisasi. Belanja modal Meja Kerja diproyeksikan akan direalisasikan pada bulan Juli Tahunanl.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022

<i>Uraian</i>	<i>Realisasi TA 2023</i>	<i>Realisasi TA 2022</i>	<i>Naik (Turun)%</i>
Meja Kerja	56,700,000		
Penghancur kertas	5.000.000		
AC Split	9.000.000		
Infokus	14.200.000		
Jumlah Belanja Bersih	84,900,000		

B.6 Belanja COVID-19

Belanja COVID-19 merupakan pengeluaran anggaran untuk menangani dan mencegah penyebaran COVID-19 di Lingkungan Kantor Pelayanan kekayaan negara dan Lelang Jakarta IV

Realisasi Belanja COVID-19 TA 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Realisasi TA 2023
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	2,411,000
Jumlah Belanja Kotor	2,411,000
Pengembalian	
Jumlah Belanja Bersih	2,411,000

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp 0,-

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,- uang setoran milik pihak ketiga dan bukan berasal yang bukan berasal dari UP/TUP. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No.	KETERANGAN	TA. 2023	TA.2022
1.	Bank No. acc 9890145379371000 an. BPG 019 KPKNL Jakarta IV	0	0
2.	Uang Tunai	0	0
3.	UM Perjadin	0	0
	JUMLAH	0	0

C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp18,454,545,-

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar masing-masing Rp18,454,545,- dan Rp0,-. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.



Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

No.	KETERANGAN	TA. 2023	TA.2022
1.	Bank No. acc 9154779 an. BPL 019 KPKNL Jakarta IV utk piutang	18,454,545	0
2.	Bank No. acc 9154768 an. BPL 019 KPKNL Jakarta IV utk lelang	0	0
	JUMLAH	18,454,545	0

C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp 245,654,658,-

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp 245,654,658,- dan Rp 20,677,480,005,-.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara Kas di bendahara penerimaan antara lain uang angsuran yang kerekening penampungan piutang negara yang masuk di hari libur akhir bulan dan tidak disetor ke kas negara karena menghindari deviasi; dan uang mengendap di bendahara penerimaan yang dikarenakan adanya pelunasan peserta wanprestasi, uang jaminan lelang bulan juli dan uang pelunasan lelang peserta.

Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	245,654,658	20,677,480,005
Jumlah	245,654,658	20,677,480,005



Piutang Bukan Pajak
Rp0,-

C.4 Piutang Bukan Pajak dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Piutang bukan pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Penyisihan piutang tidak tertagih – bukan pajak adalah pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih dengan cara mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Saldo Piutang Bukan Pajak (netto) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Rincian Piutang Bukan Pajak per per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

Keterangan	2023	2022
Piutang Bukan Pajak	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	0	0
Piutang Bukan Pajak (netto)	0	0

C.5 Persediaan

Persediaan
Rp133,541,740,-

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp133,541,740,- dan Rp80,053,089,-

Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:



Rincian Persediaan

No	Uraian	2023	2022
1	Barang Konsumsi	133,541,740	80,053,089
2	Barang Untuk Pemeliharaan		
3	Suku Cadang		
4	Bahan Baku		
5	Persediaan Lainnya		
	Jumlah	133,541,740	80,053,089

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Terdapat barang konsumsi senilai Rp0 Berada dalam kondisi rusak atau usang dan tidak disajikan dalam persediaan.

C.6 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin
Rp4,470,500,878,-

Peralatan dan mesin adalah berupa mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp4,470,500,878,- dan Rp4,305,300,878,-. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:



Saldo per 31 Desember 2022	4,305,300,878
Mutasi Tambah:	
- Pembelian	84,900,000
- Transfer Masuk	-
- Reklasifikasi Masuk	-
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-
- Transaksi Normalisasi Aset	-
Mutasi Kurang:	
- Penghentian Aset dari Penggunaan	
- Reklasifikasi Keluar	-
- Penyusutan Reguler	-
Saldo per 31 Desember 2023	4,470,500,878
Akumulasi Penyusutan s.d. per 31 Desember 2023	3,949,305,081
Nilai Buku per 31 Desember 2023	521.195.797

Mutasi transaksi dari pengurang dari peralatan dan mesin.

C.7. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya
Rp 8,743,450

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp8,743,450 dan Rp8,743,450. Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini adalah Buku-buku Perpustakaan dan Lukisan. Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	8,743,450
Mutasi Tambah:	
- Pembelian	0
Mutasi Kurang:	
-	8,743,450
Saldo per 31 Desember 2023	0
Akumulasi Penyusutan s.d. per 31 Desember 2023	0
Nilai Buku per 31 Desember 2023	0

C.8. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap Rp
(3,949,305,081)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp(3,949,305,081) dan Rp(3,723,882,241). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4,470,500,878	(3,949,305,081)	521.195.797
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0



4	Aset Tetap Lainnya	8.743.450	0	8.743.450
---	--------------------	-----------	---	-----------

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.9. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain Rp
Rp0-

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp0,- dan Rp0,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	0
Mutasi Tambah:	
-	0
Mutasi Kurang:	
-	0
Saldo per 31 Desember 2023	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	0
Nilai Buku per 31 Desember 2023	0

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.10. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp 0,-

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp0 dan Rp0,-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya



No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	0	0	0
2	Aset Lain-lain	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil.

Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

C.11 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari
KPPN Rp0,-

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp.0,-.

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.12 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp 247,490,200,-

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp247,490,200,- dan Rp20,678,274,488,-.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	-
2.	Utang kepada Pihak Ketiga	247,490,200	Dana pihak ketiga yang belum dipindahbukukan /



	Lainnya		ditransfer ke pihak yang berhak dan dana yang masih dalam proses indentifikasi dan konfirmasi.
	Total	247,490,200	

C.13 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek
Lainnya
Rp 0,-

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada Kas Umum Negara dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Utang Jangka Pendek Lain-Lain	0	-
	Total	0	

C.14 Ekuitas

Ekuitas Rp
680,099,990,-

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp680,099,990,- dan Rp669,420,693,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB
Rp. 89,136,818,468,-

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp89,136,818,468,- dan Rp21,342,278,059,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2023 dan TA 2022

Uraian	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	Naik (Turun)%
Pendapatan Jasa	89,136,818,468	21,342,278,059	69
Pendapatan Jasa Lain-lain	0	0	0,00%
Jumlah	89,136,818,468	21,342,278,059	69

Pendapatan Jasa merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari Jasa Lelang, pengurusan Piutang Negara, yang berasal dari transaksi tahun 2023.

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp0,-

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Rincian Beban Pegawai
TA 2023 dan TA 2022*

Uraian	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	Naik (Turun) %
Beban Gaji dan tunjangan	0	0	0
Beban Lembur	0	0	
Jumlah	0	0	0



Beban Persediaan
Rp. 155,273,814,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp155,273,814,- dan Rp193,997,999,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan
TA 2023 dan TA 2022

Uraian Jenis Beban	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	155,273,814	193,997,999	(20)
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0	0,00%
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0,00%
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0,00%
Jumlah	155,273,814	193,997,999	(20)

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan
Jasa Rp938,177,942,-

Jumlah Beban Barang dan Jasa 30 Juni tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp938,177,942,- dan Rp870,918,270,-. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa
TA 2023 dan TA 2022

Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	Naik (Turun)%
Beban Keperluan Perkantoran	605,736,551	573,560,901	
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	12,451,000	0	
Beban Pengiriman Surat Dinas	35,980,500	22,392,905	



Pos Pusat			
Beban honor Operasional Satuan Kerja	173,016,000	162,336,000	
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2,411,000	20,432,260	
Beban Barang Operasional Lainnya	25,925,000	30,315,250	
Beban Bahan	31,510,780	15,746,600	
Beban Honor Output Kegiatan	0		
Beban barang Non Oprasional Lainnya	32,637,200	26,974,000	
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	9,666,000	
Beban Langganan Telepon	9,107,011	9,494,354	
Jumlah	938,177,942	870,918,270	

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp198,529,817,- dan Rp164,720,190,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Beban Pemeliharaan
Rp198,529,817,-*

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2023 dan TA 2022

Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	Naik (Turun)%
--------	----------------------	----------------------	------------------



Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	198,529,817	164,720,190	0,00
Beban Pemeliharaan Lainnya	0	0	0,00
Jumlah	198,529,817	164,720,190	

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas
Rp392,863,710,-

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp392,863,710,- dan Rp202,362,658,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan beban perjalanan dinas pada tahun 2022 disebabkan penurunan pagu perjalanan dinas KPKNL Jakarta IV yang sudah tidak melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka revaluasi BMN dan juga penghematan dalam rangka penanganan COVID-19. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2022 dan TA 2019*

Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	Naik (Turun)%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	216,914,710	52,212,658	0,00%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	175,949,000	150,150,000	0,00%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0,00%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0,00%
Jumlah	392,863,710	202,362,658	



D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp215,630,340,-

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp215,630,340,- dan Rp191,868,147. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2023 dan TA 2022*

<i>Uraian</i>	<i>REALISASI TA 2023</i>	<i>REALISASI TA 2022</i>	<i>Naik (Turun) %</i>
<i>Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin</i>	215,630,340	191,868,147	0,00%
<i>Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan</i>	0	0	0,00%
<i>Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan</i>	0	0	0,00%
<i>Beban Penyusutan, Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah</i>	0	0	0,00%
<i>Jumlah Penyusutan</i>	215,630,340	191,868,147	0,00%
<i>Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud</i>	0	0	0,00%
<i>Beban Penyusutan Aset Lain-lain</i>	0	0	0,00%
<i>Jumlah Amortisasi</i>	0	0	0,00%
<i>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</i>	215,630,340	191,868,147	



Beban Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih
Rp0,-

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk 31 Desember tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp,-. Beban Penyusutan Piutang Tidak Tertagih merupakan beban untuk mencatat alokasi piutang tidak tertagih. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
TA 2023 dan TA 2022

Uraian	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	Naik (Turun)%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0	0	0
Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0	0	0

D.9 Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional Rp0,-

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
TA 2023 dan TA 2022

Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	Naik (Turun)%
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	0
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0	0	0
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0	0	0
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0



Penjualan Alat Kantor	0	0	0
Defisit Selisih Kurs	0	0	0
Surplus (Defisit dari Kegiatan Non Operasional)	0	0	0

*) pendapatan/beban penyesuaian Nilai persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO).



E. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp. 669,420,693,-

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing masing sebesar Rp669,420,693,- dan Rp725,885,408,-.

E.2. Surplus (Defisit) LO

Surplus LO
Rp87,236,342,845,-

Jumlah Surplus LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp87,236,342,845,- dan Rp. 51,259,056,187,-.

Surplus LO merupakan selisih tambah Antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

E.3. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai
Tahun Berjalan
Rp0,-

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Merupakan nilai penyesuaian nilai aset yang berasal dari persediaan.

E.4. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai
Persediaan
Rp0,-

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk tahun 2023 dan 2022 adalah masing masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

No	Jenis Persediaan	Koreksi
1	Barang Konsumsi	0
2	Suku Cadang	0
3	Barang Persediaan Lainnya	0
Jumlah		0

E.5. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset
Tetap
Rp0,-

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.



E.6. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap
Rp0,-

Koreksi Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

No	Jenis Aset Tetap	Koreksi
1	Peralatan dan Mesin	0
2	Gedung dan Bangunan	0
	Jumlah	0

E.7. Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain
Rp0,-

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

No	Jenis Beban	Koreksi
1	Koreksi Beban	0
2	Koreksi Pendapatan	0
3	Koreksi Piutang	0
4	Koreksi Kewajiban	0
5	Koreksi Hibah	0
	Jumlah	0

E.8. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar
Entitas
Rp(87,225,663,548)

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp(87,225,663,548) dan Rp(51,315,520,902). Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas



No	Transaksi Antar Entitas	Nilai
1	Diterima dari Entitas Lain	(89,118,363,923)
2	Ditagihkan ke Entitas Lainnya	1,822,192,875
3	Transfer Masuk	0
4	Transfer Keluar	0
5	Pengesahan Hibah Langsung	0
6	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0
	Jumlah	(73,102,369,833)

E.9. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp680,099,990,-

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember Tahun 2023 dan 2022 adalah masing masing sebesar Rp680,099,990,- dan Rp669,420,693,-.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

a. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV sampai dengan periode 31 Desember 2023 telah melakukan revisi anggaran sebanyak 3 kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Revisi pertama, sesuai dengan Surat Kepala Kantor KPKNL Jakarta IV Nomor S-1242/KNL.0704/2023 Tanggal 13 Februari 2023 terkait hal Usulan Revisi Anggaran yang ditujukan kepada Kepala Kanwil DJPBN Provinsi DKI Jakarta (Pemutakhiran Data POK dan Pemutakhiran Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA);
2. Revisi Kedua, sesuai dengan Surat Kepala Kantor KPKNL Jakarta IV Nomor S-2640/KNL.0704/2023 Tanggal 11 April 2023 terkait hal Usulan Revisi Anggaran yang ditujukan kepada Kepala Kanwil DJPBN Provinsi DKI Jakarta (Pemutakhiran Data POK dan Pemutakhiran Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA);
3. Revisi Ketiga, sesuai dengan nota dinas Kepala KPKNL Jakarta IV Nomor ND-520/KNL.0704/2023 tanggal 14 April 2023 hal Usulan Revisi Anggaran yang ditujukan kepada Kepala Kanwil DJPBN Provinsi DKI Jakarta (Pemutakhiran Data POK);